

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang atau perseorangan serta badan suatu usaha milik perorangan yang mana keduanya bukan merupakan anak dari sebuah perusahaan lain dan/atau bukan merupakan cabang suatu perusahaan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 BAB I pasal 1). Kemudian berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki beberapa kriteria yang terbagi sebagai berikut:

1. Kriteria pertama yaitu usaha mikro, usaha tersebut memiliki kekayaan bersih dengan nominal tidak lebih dari Rp 50.000.000,- yang mana kekayaan tersebut tidak terkait dengan tanah dan bangunan tempat usaha serta usaha tersebut harus memiliki hasil dari penjualan tahunan tidak lebih besar dari Rp 300.000.000,-.
2. Kriteria kedua yaitu usaha kecil, usaha tersebut memiliki kekayaan bersih dengan nominal lebih dari Rp 50.000.000,- dengan batas maksimal Rp 500.000.000,- yang mana kekayaan tersebut tidak terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha serta memiliki hasil dari

penjualan tahunan dengan nominal lebih dari Rp 300.000.000,- dengan batas maksimal Rp 2.500.000.000,- .

3. Kriteria ketiga yaitu usaha menengah, usaha tersebut memiliki kekayaan bersih dengan nominal lebih dari Rp 500.000.000,- dengan batas maksimal Rp 10.000.000.000,- yang mana kekayaan tersebut tidak terkait dengan tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan dengan nominal lebih dari Rp 2.500.000.000,- dengan batas maksimal sebesar Rp 50.000.000.000,-.

## **2.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan sebuah hasil yang didapatkan dari proses akuntansi yang mana akan menghasilkan informasi keuangan suatu perusahaan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak berkepentingan guna membuat suatu keputusan ekonomi (Isnawan, 2012). Menurut Isnawan (2012), laporan keuangan memiliki beberapa jenis yang dapat dikelompokkan sebagai Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan yang terakhir Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan berbentuk catatan yang memuat informasi posisi keuangan suatu perusahaan dengan jangka waktu atau periode tertentu yang mana menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh *banker*, kreditur, pemilik dan pihak berkepentingan untuk dasar melakukan analisis dan interpretasi kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Laporan keuangan merupakan bentuk hasil *final* siklus akuntansi yang menggambarkan kondisi dan posisi keuangan serta hasil operasi kegiatan usaha suatu perusahaan dengan periode tertentu (Arief Sugiono dan Edi Untung (2016:1). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun (2016), laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan ketersediaan informasi kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi. Laporan keuangan memiliki tujuan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang dikemukakan oleh Fahmi (2017:10), sebagai berikut:

1. menyediakan informasi yang berisi jenis dan jumlah aktiva (harta) dalam periode tertentu yang dimiliki perusahaan;
2. menyediakan informasi yang berisi jenis dan jumlah kewajiban serta modal suatu perusahaan dalam suatu periode;
3. menyediakan informasi yang berisi jenis dan jumlah pendapatan suatu perusahaan dalam suatu periode;
4. menyediakan informasi terkait jumlah biaya dan jenis biaya suatu perusahaan yang telah dikeluarkan dalam suatu periode;
5. menyediakan informasi terkait perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal suatu perusahaan.
6. menyediakan informasi terkait dengan kinerja manajemen suatu perusahaan dalam suatu periode.
7. menyediakan informasi terkait dengan catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

### 2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Mengacu pada SAK EMKM

SAK EMKM merupakan suatu pedoman atau standar dengan tujuan memenuhi persyaratan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang mana SAK EMKM (IAI, 2021). Standar ini ditujukan kepada pengusaha yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan akuntansi yang tercantum pada SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Pada SAK EMKM, laporan keuangan digunakan oleh entitas UMKM yang mana disusun dengan menggunakan suatu asumsi dasar yang bersifat akrual dan kelangsungan usaha, seperti yang digunakan oleh beberapa entitas selain UMKM dengan menerapkan konsep entitas bisnis. Berdasarkan SAK EMKM terdapat akun yang terdapat pada penyusunan sebuah laporan keuangan sebagai berikut:

1. Aset akan diakui apabila manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang telah dipastikan akan terjadi aliran (*flow*) ke dalam perusahaan dan memiliki biaya yang dapat diukur secara andal. Aset tidak akan diakui apabila manfaat ekonominya dianggap sulit untuk mengalir ke dalam entitas meskipun telah terjadi sebuah pengeluaran. Terdapat alternatif yang dapat dilakukan untuk transaksi tersebut yang akan memunculkan pengakuan beban pada laporan laba rugi.
2. Liabilitas akan diakui disaat pengeluaran sumber daya dengan manfaat ekonomi telah dipastikan untuk dilakukan dalam rangka penyelesaian kewajiban entitas dengan nominal yang telah ditentukan dan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan dapat diakui pada sebuah laporan laba rugi apabila dapat diidentifikasi dan jelas kenaikan manfaat ekonominya. Dengan demikian, penurunan maupun kenaikan aset dan liabilitas dapat diukur dengan andal.
4. Beban diakui apabila terdapat penurunan manfaat ekonomi pada masa mendatang yang memiliki keterkaitan dengan penurunan suatu aset atau kenaikan suatu liabilitas yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Dasar pengukuran suatu unsur laporan keuangan pada SAK EMKM yaitu suatu biaya yang disebut biaya historis. Biaya historis sendiri merupakan nominal jumlah kas atau setara kas untuk pembayaran guna memperoleh suatu aset tersebut. Biaya historis liabilitas merupakan sejumlah kas atau setara kas diterima atau perkiraan kas diayarkan guna melunasi suatu liabilitas dalam melakukan sebuah usaha normal.

Penyajian wajar sebuah laporan keuangan yang berpedoman pada SAK EMKM memberikan persyaratan kepada entitas untuk menyajikan suatu informasi dengan tujuan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan tersebut salah satunya adalah relevan yang berarti dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Kriteria selanjutnya yaitu representasi yang berarti bebas kesalahan material. Kriteria ketiga adalah keterbandingan yang mana laporan keuangan digunakan untuk perbandingan antar periode. Kriteria terakhir adalah keterpahaman yang mana informasi yang disampaikan harus mudah untuk dipahami.

Laporan keuangan memiliki batasan paling sedikit harus memuat Laporan posisi keuangan akhir periode, Laporan laba rugi selama periode dan catatan atas

laporan keuangan yang memuat tambahan serta rincian akun yang relevan (SAK EMKM). Entitas diwajibkan untuk melakukan penyajian secara lengkap dalam bentuk sebuah laporan keuangan untuk setiap akhir setiap periode pelaporan dengan mencantumkan informasi komparatifnya.

Klasifikasi dan penyajian akun dalam laporan keuangan antar periode entitas wajib untuk disusun dengan konsisten, kecuali jika terdapat beberapa hal diatur. Apabila terdapat perubahan signifikan terhadap penyajian dan klasifikasi akun dalam laporan keuangan merupakan pengecualian yang pertama. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang memberikan kesesuaian dengan pertimbangan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi pada Bab tujuh Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan. Apabila ED SAK EMKM memberikan persyaratan perubahan penyajian merupakan pengecualian kedua.

#### **2.4 Penggunaan Teknologi dan Informasi Akuntansi**

Penggunaan merupakan sebuah proses atau cara dan perbuatan untuk menggunakan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Menurut Belkaoui (2000), informasi akuntansi dapat digunakan sebagai informasi kuantitatif terkait dengan entitas ekonomi yang memiliki manfaat dalam memutuskan suatu kebijakan ekonomi. Dari kedua definisi tersebut penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa penggunaan informasi akuntansi dapat dijabarkan sebagai bentuk proses, cara, pembuatan terkait informasi akuntansi yang dapat dimanfaatkan dalam membuat sebuah keputusan ekonomi guna menentukan sebuah pilihan di antara *alternative* yang tersedia.

Menurut Holmes dan Nicholls (1988), informasi akuntansi berdasarkan manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- a) *statutory accounting information*, sebuah informasi tersedia berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;
- b) *budgetary information*, informasi akuntansi yang telah tersaji dengan bentuk suatu anggaran dan berguna untuk berbagai pihak;
- c) *additional accounting information*, sebuah informasi akuntansi lain yang telah disiapkan untuk untuk menambah efektifitas pengambilan suatu keputusan.

Menurut Achadiyah (2019), pencatatan akuntansi menggunakan basis teknologi untuk saat ini dapat dikatakan masih jarang, hal tersebut sangat terlihat pada UMKM. Di sisi lain, teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan tepat dapat memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dengan ilmu akuntansi akuntansi yang terbatas.

## **2.5 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi**

Terdapat sebuah penelitian terdahulu oleh Suhairi (2004) berkaitan dengan pengetahuan atau wawasan terkait sektor akuntansi dan kepribadian seorang wirausaha dalam menanggapi penggunaan informasi akuntansi, penelitian tersebut memberikan hasil bahwa pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh seorang wirausaha ternyata memberikan pengaruh positif pada penggunaan informasi akuntansi. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur sebagai subjeknya dengan menggunakan sampel penelitian di wilayah Jabar, Jateng, Jatim dan DKI Jakarta, hal tersebut menunjukkan bahwa jika pelaku wirausaha

mempunyai dasar pengetahuan terkait akuntansi dengan baik, maka wirausaha akan mampu menggunakan serta memahami informasi akuntansi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan.

Pengetahuan deklaratif dijabarkan sebagai suatu pengetahuan yang pembahasannya terkait dengan fakta-fakta yang didapat berpedoman pada konsep, misalnya kas adalah bagian dari *current assets*, pengetahuan tersebut dapat memberi kemudahan untuk melakukan analisis rasio, pengetahuan prosedural merupakan sebuah pengetahuan konsisten yang memiliki aturan, misalnya penggunaan suatu catatan keuangan pada periode yang sebelumnya. Pengetahuan deklaratif dilihat tergantung pada instruksi yang tersedia, di sisi lain pengetahuan prosedural dilihat berdasarkan pada pengalaman (Bonner dan Walker, 1994).

Holmes dan Nicholls (1988) memberikan pernyataan bahwa yang menyebabkan suatu permasalahan dalam melakukan penerapan akuntansi yaitu kurangnya pengetahuan pelaku usaha, pemilik atau manajer perusahaan tentang akuntansi. Menurut Holmes dan Nicholls (1988), pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural dianggap mampu memberikan peningkatan kinerja (*performance*). Pengetahuan manajer, pelaku usaha dan/atau pemilik yang kurang memadai atau mendukung menjadi salah satu pemicu rata-rata perusahaan kecil dan menengah memilih untuk mempekerjakan jasa konsultan dan/atau akuntan publik untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan mendapatkan *output* berupa informasi akuntansi.